

May 2016

## Teori Imperialisme Baru dan Debat Marxisme-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional

Rizky Alif Alvian

*Department of International Relations, Gadjah Mada University, rizky.alif.a@mail.ugm.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

---

### Recommended Citation

Alvian, Rizky Alif (2016) "Teori Imperialisme Baru dan Debat Marxisme-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 18 : No. 1 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v18i1.47

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol18/iss1/6>

This Critical Literature Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Global: Jurnal Politik Internasional* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## TEORI IMPERIALISME BARU DAN DEBAT MARXISME-REALISME DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Rizky Alif Alvian

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

Email: rizky.alif.a@mail.ugm.ac.id

### Abstract

*This paper aims to discuss the contribution of new imperialism theory for International Relations. This contribution will be analyzed by positing new imperialism theory in the light of Marxism-Realism debate. This debate is centered on the question on how the relation between state and mode of production should be formulated. While Realism tends to underestimate the role of mode of production in international relations, Marxism tends to underestimate the role of state. This paper argues that new imperialism theory could be understood as an experiment to resolve this issue. By separating "economy" and "the logic of capitalism" from "politic" and "the logic of territorial", new imperialism theory attempts to reconcile the role of state and mode of production in the analysis of international relations.*

### Keywords

*Realism, Marxism, New Imperialism Theory, State, Mode of Production*

### Abstrak

*Artikel ini bertujuan untuk membahas kontribusi teori imperialisme baru untuk Ilmu Hubungan Internasional. Sumbangan ini akan dianalisis dengan mengajukan teori imperialisme baru dalam perdebatan paradigma Marxisme-Realisme. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara negara dan moda produksi perlu dirumuskan. Sementara Realisme cenderung mengecilkan peran moda produksi dalam hubungan internasional, Marxisme cenderung mengucilkan peran negara. Artikel ini kemudian berpendapat bahwa teori imperialisme baru dapat dipahami sebagai percobaan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan memisahkan "ekonomi" dan "logika kapitalisme" dari "politik" dan "logika teritorial", teori imperialisme baru mencoba untuk mendamaikan peran negara dan cara produksi dalam analisis kajian Hubungan Internasional.*

### Kata Kunci

*Realisme, Marxisme, Teori Imperialisme Baru, Negara, Cara Produksi.*

## PENDAHULUAN

Dalam *Rethinking International Relations*, Fred Halliday (1994, hal. 49) menulis bahwa Marxisme tak pernah menempati posisi yang nyaman dalam Ilmu Hubungan Internasional. Marxisme hanya menjadi "minority approach" (Gills, 1987), "silent partner (Kubalkova & Cruckshank, 2015)", serta menduduki "marginal role (Maclean, 1988)" dalam Ilmu HI. Dipinggirkannya Marxisme dari dialog arus-utama Ilmu HI semula terjadi karena Marxisme dipandang sebagai perspektif yang kurang ilmiah. Dalam

konteks Perang Dingin, Marxisme bukan hanya diwarnai dengan nuansa dogmatisme yang kuat, tetapi juga dipandang semata-mata sebagai alat bagi kelompok tertentu – khususnya kelompok komunis – untuk membenarkan kepentingan politik mereka.

Meski demikian, posisi marjinal Marxisme dalam Ilmu HI juga disebabkan oleh serangkaian permasalahan teoritik yang tercermin dalam perdebatan antara Realisme dan Marxisme. Sementara Realisme cenderung memahami perilaku negara-bangsa sebagai sesuatu yang *independen* dari struktur moda produksi, Marxisme cenderung memahami perilaku negara-bangsa sebagai *efek* dari dinamika di dalam struktur moda produksi. Sebaliknya, sementara Realisme – khususnya Neorealisme – memahami perilaku negara-bangsa sebagai *efek* dari struktur internasional yang anarkis, Marxisme cenderung *mengabaikan* pengaruh struktur internasional terhadap perilaku negara-bangsa. Dengan kata lain, bagaimana hubungan antara moda produksi dan sistem negara-bangsa menjadi fokus perdebatan di antara Realisme dan Marxisme. Pada gilirannya, kemampuan Marxisme untuk menjawab permasalahan ini akan mempengaruhi posisi Marxisme dalam studi hubungan internasional.

Makalah ini berusaha meninjau bagaimana permasalahan tersebut berusaha diatasi oleh sejumlah teori “imperialisme baru” (*new imperialism*). Teori-teori imperialisme baru pada dasarnya berusaha meneliti bagaimana relasi yang tak seimbang dalam hubungan internasional terjadi ketika kapitalisme menjadi moda produksi yang dominan di dunia. Berbeda dengan argumen yang diangkat oleh Negri dan Hardt atau Panitch dan Gindin, teori imperialisme baru berpendapat bahwa politik internasional hari ini masih diwarnai dengan kontestasi di antara berbagai negara kapitalis. Argumen ini membedakan teori imperialisme baru dengan teori Negri dan Hardt atau Panitch dan Gindin yang cenderung mengatakan bahwa politik internasional saat ini dicirikan dengan tumbuhnya kekuatan supranasional maupun dominasi Amerika Serikat yang, pada akhirnya, membuat kontestasi di antara berbagai negara-bangsa menjadi sukar terjadi. Pemikir seperti David Harvey, Alex Callinicos dan Peter Gowan menjadi sejumlah pemikir yang bisa dikategorikan sebagai teoritis imperialisme baru (Callinicos, 2007).

Lebih jauh, teori-teori imperialisme baru ini mengklaim bahwa imperialisme pada era kontemporer dicirikan dengan terpisahnya ranah “ekonomi” dari “politik”, “privat” dari “publik”, dan “logika kapitalisme” dari “logika teritorial”. Pemisahan ini memungkinkan teori-teori ini untuk merumuskan hubungan antara moda produksi dan negara-bangsa dengan cara yang lebih memuaskan dibandingkan dengan teori-teori imperialisme pendahulunya. Dalam perspektif ini, walau moda produksi dan negara-

bangsa saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain, keduanya dapat bertindak secara terpisah. Karenanya, perilaku negara tak selalu bisa direduksi sebagai refleksi dari kepentingan ekonomi sebagaimana perilaku negara juga tak bisa dibaca sebagai sesuatu yang selalu terpisah darinya. Di titik inilah teori imperialisme baru dapat diperhitungkan sebagai teori yang dapat mengurai permasalahan yang muncul dalam perdebatan Realisme-Marxisme.

Makalah ini akan dibagi menjadi sejumlah bagian. Pertama, makalah ini akan mendiskusikan bagaimana Realisme dan Marxisme berusaha menjelaskan hubungan internasional. Pada bagian ini, makalah ini akan sekaligus mengeksplisitkan titik perdebatan di antara kedua perspektif ini. Kedua, makalah ini akan mendiskusikan teori imperialisme baru. Pada bagian ini, makalah ini akan berusaha mengidentifikasi kebaruan teori ini dibandingkan dengan teori imperialisme terdahulu, memaparkan bagaimana teori imperialisme baru memahami hubungan internasional, sekaligus mengidentifikasi solusi yang ditawarkan teori imperialisme baru bagi problem teoritis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Bagian ini juga akan mengurai berbagai kritik terhadap teori imperialisme baru serta keterbatasan yang dimiliki teori-teori ini. Terakhir, makalah ini akan ditutup dengan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Realisme dan Marxisme: Perdebatan**

Bagian ini akan mendiskusikan secara ringkas bagaimana Realisme dan Marxisme memahami hubungan internasional. Setelah mengidentifikasi sejumlah premis dasar dari kedua perspektif tersebut, bagian ini akan melangkah lebih jauh untuk membicarakan perdebatan di antara kedua perspektif ini.

Argumen dasar dari Realisme diringkas oleh Robert Gilpin sebagai berikut:

*“The first is the essentially conflictual nature of international affairs. ... The second ... is that the essence of social reality is the group ... in a world of scarce resources and conflict over the distribution of those resources, human beings confront one another ultimately as members of groups, and not as isolated individuals. Homo sapiens for most of us ranks above all loyalties other than that of the family. In the modern world, we have given the name ‘nation-state’ to these competing tribes and the name ‘nationalism’ to this form of loyalty. True, the name, size, and organization of the competing groups into which our species subdivides itself do alter over time – tribes, city-states, kingdoms, empires, and nation states – due to economic, demographic and technological changes. Regrettably, however, the essential nature of intergroup conflict does not. The third assumption that I believe characterizes realist thinking is the primacy in all political life of power and security in human motivation (Davenport, 2011, hal. 36).”*

Stephen Krasner, dalam diskusinya mengenai Neorealisme, menuliskan:

*“... the ontological given for realism is that sovereign states are the constitutive components of the international system. Sovereignty is a political order based on territorial control. The international system is anarchical. It is a self-help system. There is no authority that can constrain or channel the behaviour of states. Sovereign states are rational self-seeking actors resolutely if not exclusively concerned with relative gains because they must function in an anarchical environment in which their security and well-being ultimately rest on their ability to mobilise their own resources against external threats (Krasner, 1992, hal. 39).”*

Dua kutipan di atas cukup memadai untuk menggambarkan bagaimana Realisme – dan juga Neorealisme – memahami hubungan internasional. Realisme menggambarkan hubungan internasional sebagai lingkungan yang konfliktual dimana manusia – yang saat ini mengelompok dalam bentuk negara-bangsa yang berdaulat dengan nasionalisme sebagai pengikatnya – saling berkonflik satu sama lain. Sementara Realisme Klasik menyandarkan penjelasannya pada aspek natural dari kehidupan manusia, Neorealisme mengatakan bahwa sistem internasional-lah yang mendorong negara untuk berkonflik. Kondisi sistem internasional yang anarkis membuat negara dituntut untuk mempertahankan diri dari ancaman, mengutamakan kepentingan diri sendiri, serta mengandalkan diri sendiri. Negara diandaikan selalu berada dalam keadaan merasa tidak aman (*insecure*) sehingga berusaha memperkuat diri sendiri serta melemahkan lawan-lawannya.

Sementara itu, Marxisme didasari asumsi yang cukup berbeda. Gills menuliskan bahwa:

*“The fundamental premise in Marx’s methodology is that historical, material forces, embodied in the economic structure of society (as constituted by the forces of production and the relations of production) are the foundation upon which class struggle and the movement of history rest, and upon which a critical analysis must concentrate (Gills, 1987, hal. 39).”*

Halliday meringkas empat aspek penting yang menyusun argumen Marxisme. *Pertama*, Marxisme berpendapat bahwa aktivitas utama suatu masyarakat adalah produksi ekonomi. Moda produksi yang berbeda – yang ditentukan berdasarkan bentuk dari “*forces of production*” dan “*relation of production*” yang ada – akan diikuti dengan bentuk masyarakat yang selaras dengan moda produksi tadi. Karenanya, perilaku manusia tak bisa dilepaskan dari konteks sosio-ekonomi tempat ia hidup. *Kedua*, sejarah membentuk perilaku manusia hari ini. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu tak dapat diterima begitu saja. Sebaliknya, apa yang dapat diamati hari ini – termasuk negara – memiliki konteks historis yang membentuk keberadaannya hari ini. Mengikuti Halliday,

sistem negara-negara yang saat ini dominan lahir beriringan dengan tumbuhnya kapitalisme. *Ketiga*, kelas sosial menjadi aktor penting dalam kehidupan politik. Dalam Marxisme, kelas didefinisikan berdasarkan kepemilikan mereka terhadap alat-alat untuk melakukan produksi ekonomi. Dalam moda produksi kapitalisme, misalnya, kelas proletar merupakan kelas yang tak memiliki akses terhadap alat produksi. Sebaliknya, kelas borjuis merupakan kelas yang memiliki akses terhadap alat produksi. Kelas proletar, karena tak memiliki alat produksi, harus bekerja kepada kelas borjuis agar dapat memperoleh gaji sehingga dapat bertahan hidup sementara kelas borjuis mengambil hasil kerja kelas proletar tersebut untuk kepentingan mereka sendiri—sesuatu yang disebut sebagai “eksploitasi”. Hadirnya kelas sosial sebagai aktor yang perlu dipertimbangkan membuat negara kehilangan keistimewaannya sebagai aktor terpenting dalam hubungan internasional. *Keempat*, Marxisme menekankan pentingnya konflik, baik dalam bentuk revolusi maupun perang. Ketimpangan antara kelas proletar dan borjuis serta eksploitasi yang terjadi di antara keduanya dapat mendorong kelas proletar untuk merebut akses terhadap alat produksi yang semula dimiliki kelas borjuis. Hal inilah yang dimaksud sebagai revolusi. Sementara itu, kelas borjuis di satu negara juga dapat berkonflik dengan kelas borjuis di negara lain untuk memperebutkan pasar, sumber daya, atau teritori (Halliday, 1994, hal. 59-68).

Uraian ringkas tentang Realisme dan Marxisme di atas tentu saja bersifat karikatural. Meski demikian, berangkat dari uraian di atas, di titik ini, perbedaan di antara Realisme dan Marxisme mulai dapat diurai.

Kedua perspektif ini memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana perilaku negara-bangsa. Neorealisme berpendapat bahwa perilaku negara-bangsa merupakan efek dari struktur dunia internasional yang anarkis. Ketiadaan otoritas pusat dalam dunia internasional membuat negara-bangsa tidak dapat mengetahui apa tindakan yang direncanakan oleh aktor lain. Konsekuensinya, aktor dituntut untuk memastikan keselamatan dirinya sendiri di dalam dunia internasional karena tak ada siapapun yang bisa diharapkan. Kontestasi di antara aktor dengan demikian merupakan efek dari struktur dunia internasional yang anarkis. Lebih jauh, dalam kondisi anarkis ini, negara akan memiliki kecenderungan untuk melakukan *balancing* baik dengan cara beraliansi atau meningkatkan kekuatan tempur (Krasner, 1992).

Sementara itu, Marxisme melihat perilaku negara-bangsa sebagai efek dari struktur moda produksi. Dalam konteks pemikiran Lenin, misalnya, kontestasi di antara negara-bangsa merupakan konsekuensi dari keberadaan kapitalisme yang memaksa

pemilik modal untuk terus melakukan akumulasi apabila mereka tak ingin posisi mereka tergusur akibat kompetisi (Brewer, 1990, hal. 109-134; Callinicos, 2007, hal. 540; Harvey, 2006, hal. 28-29). Keharusan kapitalis finans untuk memperbesar kapitalnya mendorong mereka untuk mengirimkan kapital ke negara-negara yang dapat memberi keuntungan lebih besar. Posisi kapitalis finans yang sentral di dalam negara pada akhirnya membuat negara menjadi alat bagi mereka untuk meraih profit yang lebih banyak. Rivalitas di antara berbagai kapitalis finans inilah yang, menurut Lenin, membuat kontestasi di antara berbagai negara menjadi mungkin. Pada gilirannya, ekspansi kapital tersebut juga dimungkinkan oleh adanya struktur kelas yang memisahkan kelas pemilik modal dari kelas pekerja yang tak memiliki apapun untuk dijual selain tenaga kerjanya.

Problem struktur di atas lebih jauh memantik perdebatan di antara Realisme dan Marxisme mengenai faktor mana yang paling dominan dalam menentukan perilaku negara dalam dunia internasional. Realisme cenderung berpendapat bahwa permasalahan politik dan keamanan merupakan faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan negara dalam merumuskan tindakannya. Seperti yang telah disinggung di atas, Neorealisme secara lebih spesifik berpendapat bahwa struktur internasional yang anarki memaksa negara untuk mengutamakan keamanannya dalam dunia internasional. Argumentasi sebaliknya diusung oleh Marxisme. Usaha untuk mengakumulasi kekayaan menjadi motif utama yang melatari fenomena politik internasional. Ada sesuatu di luar struktur anarki internasional yang membuat konflik muncul dalam politik internasional—dan hal itu adalah pasar dan kapitalisme (Halliday, 1994, hal. 67).

Dalam konteks perdebatan ini, tantangan terbesar yang diberikan Realisme terhadap Marxisme adalah tentang bagaimana menjelaskan fenomena nasionalisme serta kontestasi yang terjadi di antara berbagai bangsa (Halliday, 1994, hal. 70; Berki, 1971, hal. 105). Meskipun Marxisme berpendapat bahwa meluasnya kapitalisme akan berujung pada ditinggalkannya kesadaran nasional, Berki menunjukkan bahwa nasionalisme justru menjadi semakin kuat. Alih-alih melampaui nasionalisme dan negara-bangsa, kelas proletar justru terikat makin erat dengan bangsanya serta berusaha mempertahankan kedaulatan negara-bangsanya dalam bentuk perang dan lain sebagainya. Sejalan dengan argumen Gilpin yang telah dikutip sebelumnya, Realisme berpendapat bahwa Marxisme gagal menyadari bahwa manusia memiliki kecenderungan yang amat besar untuk berkelompok dan berkontestasi antara satu sama lain dengan basis pengelompokan tersebut. Manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan “*internal unity*” di dalam kelompoknya serta “*external division*” dengan kelompok-kelompok lain (Davenport,

2011, hal. 31). “*Intergroup conflict*” – meminjam terminologi Gilpin – selalu mewarnai kehidupan manusia dan tak bisa dijelaskan dengan serta-merta melacak faktor ekonomi yang menggerakkan konflik tersebut.

Di samping itu, Neorealisme juga menyebut Marxisme sebagai teori yang bersifat “reduksionis” dalam memahami dunia internasional. Dalam kritiknya, Waltz menyebutkan bahwa berbagai negara dalam sejarah telah melakukan kebijakan yang bersifat imperialis terlepas dari atribut ekonomi yang dimilikinya. Terdapat berbagai kasus dimana imperialisme dilakukan oleh negara-negara yang belum memiliki moda produksi kapitalis. Artinya, tindakan negara tak bisa dijelaskan dengan menilik moda produksinya. Hal ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi Waltz untuk melakukan kritik lebih jauh terhadap Marxisme. Analisis Marxisme selalu mengandaikan bahwa faktor yang mendorong kebijakan imperialis berada di *dalam* negara dan bukan merupakan *respon* negara terhadap lingkungan internasional yang dihadapinya. Karena ternyata kondisi internal negara yang melakukan imperialisme tidaklah seragam, maka Waltz berargumen bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internasional yang dihadapinya – yakni sistem internasional yang anarkis – alih-alih kondisi internal negara itu. Di titik inilah Waltz mengatakan bahwa Marxisme bersifat reduksionis. Sebaliknya, Neorealisme menjadi teori yang “sistemik” karena teori ini mendasarkan perilaku negara bukan pada kondisi moda produksi masing-masing negara, melainkan pada sistem internasional yang memaksa negara untuk berperilaku dengan cara tertentu. Struktur internasional ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang abadi, ahistoris, dan terus-menerus meregulasi bagaimana negara berdaulat – atau unit lain yang sejenis – berinteraksi antara satu sama lain (Waltz, 1979, hal. 35-37).

Dua catatan di atas memukul Marxisme di titik yang sama. Keduanya berusaha untuk menunjukkan bahwa Marxisme telah mengabaikan pentingnya analisis terhadap sistem negara-bangsa *qua* sistem negara-bangsa. Kritik Gilpin, Berki, dan Davenport menggarisbawahi kelemahan Marxisme dalam menjelaskan kecenderungan manusia untuk mengelompok serta kemunculan “*intergroup conflict*” yang menyertai pengelompokan itu. Sementara itu, kritik Waltz berusaha menunjukkan bahwa Marxisme mengabaikan aspek “sistemik” dari dunia internasional dalam usahanya untuk menjelaskan perilaku negara-bangsa. Marxisme mereduksi perilaku negara-bangsa semata-mata sebagai dinamika moda produksi di dalam negara. Peran lingkungan internasional—dengan strukturnya yang spesifik—dalam membentuk perilaku negara

cenderung diabaikan. Waltz lebih jauh berusaha menunjukkan bahwa struktur internasional inilah yang berperan dalam membentuk perilaku negara.

Kritik-kritik ini, menurut Linklater, “*successfully demonstrated that Marxism overestimated the importance of class and production and underestimated the impact of strategic competition and war on human history* (1990, hal. 4).” Halliday memberikan komentar yang lebih panjang mengenai hal ini:

“*This general problem with the level of determination of the socio-economic does much to account for another area of inhibition: the relative autonomy of politics [...] a deep and unresolved problem about how to analyse politics itself. [...] Beyond demonstrating the ways in which socio-economic factors influence politics, historical materialists have often been unsuccessful in adequately defining the workings of politics itself; i.e. of that dimension of politics that is not simply an expression of the socio-economic* (Halliday, 1994, hal. 70).”

Tak pelak, berbagai pemikir Ilmu HI yang memiliki simpati terhadap potensi emansipatif Marxisme berusaha untuk memperkuat posisi perspektif ini dengan cara membangun argumen yang menyatakan bahwa fenomena politik internasional tak bisa dibaca hanya sebagai refleksi dari dinamika moda produksi meskipun dinamika tersebut tak bisa juga diabaikan begitu saja. Gills (1987, hal. 40-41) menulis, “*the logic of the global system of states cannot be separated from or reduced to that of the international economic order* (Halliday, 1987, hal. 13).” Problem ini – tentang bagaimana menghubungkan analisis moda produksi dengan analisis sistem negara-bangsa tanpa melakukan reduksi ke salah satu sisi – hingga kini masih menjadi problema yang berusaha diatasi oleh arus Marxisme dalam Ilmu HI. Perdebatan dalam *Cambridge Review of International Affairs* pada tahun 2007 menjadi salah satu gambaran terbaru tentang bagaimana Marxisme dalam studi HI berusaha mengatasi permasalahan tersebut.

Di sisi yang lain, Marxisme juga mengajukan sejumlah kritik terhadap gagasan Neorealisme mengenai struktur internasional. Apabila Waltz menyebut Marxisme sebagai teori yang reduksionis, maka Rosenberg menyebutkan bahwa Neorealisme telah melakukan “reifikasi” terhadap struktur internasional. Rosenberg berpendapat bahwa tradisi Realisme bersandar di atas pemisahan antara “*external politics*” dan “*internal politics*” – atau dalam bahasa Walker, “*inside*” dan “*outside*”. Sementara politik internal diwarnai dengan beroperasinya kedaulatan, politik eksternal didominasi dengan anarki berikut kontestasi yang menyertainya. Neorealisme kemudian berfokus pada ranah politik eksternal dan logika anarki yang beroperasi di dalamnya. Perbedaan antara politik internal dan eksternal ini kemudian dibarengi dengan teknik argumentasi Neorealisme

yang mengandaikan bahwa negara ada begitu saja sebelum struktur internasional hadir. Waltz berpendapat bahwa struktur internasional muncul sebagai produk dari interaksi di antara negara. Struktur ini kemudian membatasi serta mengarahkan perilaku negara ke arah tertentu seperti yang telah diuraikan di atas. Bagi Rosenberg, argumentasi ini pada akhirnya harus mengandaikan bahwa negara ada sebelum struktur internasional terbentuk. Konsekuensinya, Neorealisme tidak bisa menjelaskan transformasi di luar sebatas membicarakan perubahan konfigurasi *great power*. Proses yang melatari pembentukan elemen-elemen kunci dalam politik internasional – seperti negara – tidak bisa dijelaskan oleh Neorealisme (Rosenberg, 1994, hal. 23-34).

Asumsi-asumsi yang diurai di atas membuat Rosenberg menyebut Neorealisme sebagai teori yang melakukan reifikasi terhadap struktur internasional. Hal itu dilakukan dengan cara memperkenalkan perbedaan antara politik internal dan politik eksternal serta meletakkan studi HI sebagai studi yang fokus mempelajari politik eksternal. Melalui manuver ini, Neorealisme praktis menghapus keberadaan berbagai kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) dari ranah politik internal yang sebenarnya berperan besar dalam mengkonstruksi struktur politik internasional. Di saat yang sama, bangunan teoritik Neorealisme juga mencegah seseorang untuk mempelajari proses kemunculan elemen-elemen kunci dalam politik internasional. Struktur argumen Neorealisme hanya memungkinkan seseorang untuk mempelajari dinamika hubungan antar-negara dengan mula-mula menerima negara sebagai entitas yang terberi. Dengan demikian, Neorealisme telah menjadikan struktur internasional sebagai sesuatu yang independen dan ahistoris dengan asal-usul yang sukar dilacak (Rosenberg, 1994, hal. 123-142).

Argumen ini sekaligus berfungsi sebagai bantahan terhadap kritik Realisme terhadap Marxisme. Seperti yang diuraikan oleh Davenport di atas, Marxisme dipandang tidak menyadari bahwa perbedaan *inside/outside* bersifat konstitutif bagi kehidupan manusia. Alur argumen di atas sebaliknya justru berusaha menunjukkan bahwa perbedaan *inside/outside* merupakan cara Realisme melakukan reifikasi terhadap struktur internasional. Bagi Rosenberg, reifikasi ini menggambarkan bahwa Realisme sebetulnya berfungsi sebagai ideologi yang mendukung praktek penggunaan *power* dari negara-bangsa modern

Catatan ini menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya dalam rangka mengevaluasi sejauh mana inisiatif Marxisme dalam studi HI berhasil mengatasi medan problematik yang muncul dalam perdebatan Realisme-Marxisme. Marxisme bukan hanya perlu untuk mereformulasikan hubungan moda produksi dan sistem negara-bangsa tanpa

melakukan reduksi, Marxisme juga harus melakukan hal itu tanpa melakukan reifikasi terhadap sistem negara-bangsa.

### **Teori Imperialisme Baru**

Bagian sebelumnya telah mendiskusikan bagaimana perdebatan antara Realisme dan Marxisme terjadi. Kemungkinan untuk menyelesaikan perdebatan ini dan menciptakan perspektif yang lebih memadai dalam memandang fenomena hubungan internasional ditentukan berdasarkan sejauh mana hubungan antara negara dan moda produksi—antara politik dan ekonomi—dapat dirumuskan. Bagian sebelumnya juga telah membuat kriteria kasar tentang jawaban apa yang memuaskan dari pertanyaan tersebut. Formulasi atas bentuk hubungan tersebut hendaknya dapat mengakomodasi peran negara dan moda produksi sekaligus tanpa terjebak dalam determinasi moda produksi terhadap negara maupun penekanan berlebihan terhadap negara sehingga mengabaikan peran moda produksi. Di saat yang sama, formulasi tersebut tak boleh melakukan reifikasi terhadap sistem negara-bangsa.

Bagian ini berusaha untuk membaca teori imperialisme baru sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan di atas. Makalah ini berargumen bahwa teori imperialisme baru berhasil menjawab medan problematik yang muncul dalam debat Realisme-Marxisme. Meski demikian, catatan kritis tetap perlu diberikan terhadap teori-teori ini. Pasalnya, hingga derajat tertentu, teori-teori imperialisme baru memiliki kecenderungan untuk melakukan reifikasi terhadap sistem negara-bangsa.

Teori imperialisme baru adalah nama yang seringkali disematkan kepada sejumlah pemikir seperti David Harvey, Alex Callinicos, hingga Peter Gowan. Di satu sisi, teori imperialisme baru merupakan bagian dari “renaisans” teori imperialisme seiring dengan menguatnya hegemoni AS dan tumbuhnya diskursus globalisasi pada tahun 1990-an. Meski demikian, teori imperialisme baru berbeda dengan sejumlah teori imperialisme lain seperti teori dari Hardt dan Negri atau Panitch dan Gindin. Mengikuti argumen Callinicos (2007, hal. 536), perbedaan teori imperialisme baru terletak pada kecenderungannya untuk mengakui keberadaan “*significant conflicts of interest exist among them [leading capitalist states] ... [and] are likely ... to give rise to geopolitical struggles.*” Hal ini berbeda dengan, misalnya, argumen Hardt dan Negri yang berpendapat bahwa kontestasi di antara negara-bangsa cenderung sukar terjadi saat ini. Sebaliknya, politik internasional sekarang justru diwarnai dengan kemunculan kekuatan supranasional yang disebut keduanya sebagai “Empire”.

Pandangan teori imperialisme baru terhadap politik internasional—bahwa politik internasional masih diwarnai dengan kontestasi di antara negara-negara ketika kapitalisme telah begitu mengglobal—berjangkar pada suatu pemahaman yang spesifik mengenai bagaimana imperialisme saat ini bekerja. Di titik ini, berbagai argumen dari teoritis imperialisme baru memiliki satu kesamaan. Berbagai teori tersebut bersandar pada pemisahan antara “logika kapitalisme” dan “logika teritorial”; “ranah privat” dan “ranah publik”; “*economic power*” dan “*extra-economic power*”; atau “*economic reason*” dan “*geopolitical reason*”. Seluruh pemisahan ini pada akhirnya memiliki fungsi yang sama, yakni untuk memungkinkan analisis terhadap fenomena politik internasional tanpa harus mereduksi logika sistem negara-bangsa ke logika moda produksi maupun sebaliknya; sembari di saat yang sama mengakui bahwa kedua logika ini sama-sama berperan dalam menentukan perilaku negara. Gagasan Harvey dan Callinicos bisa menjadi sejumlah contoh menarik di sini.

Harvey juga menjadi teoritis yang berusaha menjelaskan fenomena imperialisme baru. Sama seperti Wood, Harvey memahami imperialisme baru sebagai sesuatu yang hadir secara spesifik dalam kapitalisme. Imperialisme baru, menurut Harvey, disusun oleh dua logika berbeda. Di satu sisi, imperialisme adalah soal bagaimana aktor – umumnya negara – menguasai teritori tertentu untuk kepentingan dirinya. Di lain sisi, aspek kapitalisme dari imperialisme baru membuat imperialisme menjadi sesuatu yang juga berkaitan dengan akumulasi kapital.

Harvey memisahkan kedua hal di atas sebagai “logika teritorial” dan “logika kapitalisme”. Logika teritorial merupakan logika yang digunakan oleh negara. Negara, menurut Harvey, berusaha untuk memperkuat posisi dirinya di hadapan negara-negara lain. Politisi juga dapat menciptakan kebijakan untuk memperkuat posisinya di hadapan warganya maupun untuk memuaskan sekelompok orang yang mendukung dirinya. Logika kapitalisme merupakan logika yang digunakan oleh kelas borjuis. Berbeda dengan logika teritorial, kelas borjuis berusaha untuk memaksimalkan profit yang diraihinya. Karenanya, logika kapitalisme tidak mengikuti batas-batas negara. Kapital bergerak secara cair menuju satu tempat ke tempat lain yang berpotensi memberi keuntungan terbesar. Harvey bersikukuh bahwa kedua logika ini berbeda—setidaknya untuk tujuan analisis. Kedua logika ini dapat saling mempengaruhi, bertemu, atau bahkan saling bertentangan dengan satu sama lain. Hubungan di antara kedua logika ini tidaklah tetap dan berubah-ubah tergantung konteks. Harvey mengkritisi pandangan yang mengatakan bahwa imperialisme semata-mata dapat dibaca sebagai ekspresi dari kepentingan

kapitalisme. Baginya, imperialisme adalah hasil interaksi dari kedua logika berbeda ini (Harvey, 2005, hal. 26-36).

Menurut Harvey, logika kapitalisme secara berkala akan menciptakan krisis overakumulasi. Krisis overakumulasi terjadi ketika proses akumulasi berlangsung sedemikian intens sehingga tercipta lebih banyak kapital daripada kemungkinan untuk menggunakannya secara menguntungkan. Bentuk spesifik dari overakumulasi bisa beragam. Misalnya, overakumulasi dapat terjadi ketika di satu sisi terdapat kapital yang terlalu banyak sambil di sisi lain terdapat pekerja yang terlalu banyak pula. Hal ini terjadi ketika kapitalisme berusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengganti buruh dengan teknologi sehingga kapital yang diakumulasi oleh kelas borjuis pun menjadi semakin banyak. Hal ini diikuti dengan semakin banyaknya buruh yang menganggur—yang, dalam perspektif kapitalisme, bisa dipakai untuk akumulasi lebih jauh. Meski demikian, berdasarkan teori nilai Marx, meningkatnya teknologi dalam proses produksi akan menurunkan tingkat laba dari sistem. Maka, paradoksnya, walaupun sistem memiliki banyak kapital dan banyak pekerja untuk meningkatkan nilai dari kapital tersebut, investasi kapital di dalam sistem tersebut menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan (Harvey, 2006, hal. 156-203). Argumen Harvey mengenai hal ini cukup rumit dan sulit sehingga makalah ini tak akan memaparkannya secara menyeluruh. Hal yang terpenting adalah bahwa kapital perlu dikirimkan ke wilayah di luar sistem dimana investasi masih memberi keuntungan yang besar ketika overakumulasi di atas terjadi. Hal inilah yang disebut Harvey (2001, hal. 237-266; hal. 284-311) sebagai “*spatial fix*.”

Peristiwa “*spatial fix*” ini, terutama ketika diarahkan pada wilayah yang belum memiliki relasi kapitalisme, akan mensyaratkan adanya “*accumulation by dispossession*”. Sama seperti argumen Wood, agar kapitalisme dapat berfungsi, maka harus ada kelas yang tak memiliki alat produksi. “*Accumulation by dispossession*” berfungsi untuk memisahkan masyarakat dari aset mereka—kerap muncul dalam bentuk *land-grabbing*. Dengan adanya pemisahan masyarakat dari alat produksi mereka, maka kapital dari negara pengirim dapat mengambil alih alat produksi sementara masyarakat yang tak memiliki alat produksi terpaksa menjadi kelas proletar. Proses perampasan ini kerap melibatkan negara, terutama ketika negara melihat proses *spatial fix* ini sebagai sesuatu yang menguntungkan kekuatan mereka dan menyelesaikan krisis yang terjadi di dalam negara (Harvey, 2005, hal. 137-156). Meski demikian, hal ini tak selalu terjadi. Logika teritorial dapat juga menahan terjadinya *spatial fix* ketika perginya kapital akan menggerus kekuatan negara. Konflik di antara negara-negara dapat terjadi ketika negara-

negara berusaha untuk menjadikan negara lain sebagai target *spatial fix* atau ketika mereka memperebutkan target *spatial fix* yang sama (Harvey, 2006, hal. 439-445).

Sejalan dengan Harvey, Callinicos (2009, hal. 67) – mengutip Sutcliffe – berpendapat bahwa kekuatan utama teori imperialisme Marxis terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan dua hal berbeda, yakni konflik di antara negara-negara serta berjalannya proses produksi. Berangkat dari tesis Lenin-Bukharin tentang imperialisme, Callinicos berpendapat bahwa imperialisme dicirikan dengan, di satu sisi, bersatunya kapital privat dan kapital negara dan, di sisi lain, kontestasi di antara negara-negara sebagai konsekuensi dari usaha pemilik kapital untuk mengakumulasi kapitalnya lebih jauh. Meski demikian, Callinicos berusaha menghindari argumen yang mengatakan bahwa tindakan negara semata-mata merepresentasikan kepentingan kapital di belakangnya.

Karenanya, Callinicos (2007, hal. 539) berargumen bahwa tindakan negara merupakan campuran (*mixture*) antara “*economic reason*” dan “*geopolitical reason*”. Analisis Marxis terhadap imperialisme kemudian diarahkan untuk mempelajari bagaimana “*economic reason*” dan “*geopolitical reason*” ini saling menaut satu sama lain tanpa menghapus perbedaan di antara keduanya. Sementara *economic reason* bertujuan untuk mengakumulasi kapital, *geopolitical reason* menjadi logika negara yang bertujuan untuk mengumpulkan teritori, menjamin keamanan, serta meningkatkan pengaruh negara di antara negara-negara lain (Callinicos, 2009, hal. 74).

Dalam membangun argumen ini, Callinicos berusaha menunjukkan bahwa sistem negara-bangsa, hingga derajat tertentu, memiliki independensi dari struktur moda produksi. Dengan menunjukkan keberadaan independensi ini, maka menjadi mungkin bagi Callinicos untuk membicarakan perilaku negara sebagai campuran di antara *economic* dan *geopolitical reasons*. Callinicos melakukan ini dengan dua cara. Pertama, secara metodologis, Callinicos menunjukkan bahwa Marx membangun argumennya secara non-deduktif. Alih-alih membuat sebuah konsep yang darinya konsep-konsep lain diturunkan, Marx—dalam *Capital*—memulai analisisnya dengan konsep sederhana untuk kemudian memperkenalkan konsep-konsep baru seiring dengan makin kompleksnya argumen. Karena itu, menurut Callinicos (2007, hal. 542), konsep negara yang independen dari nalar ekonomi justru dimungkinkan oleh metodologi Marx ini. Kedua, Callinicos menggunakan argumen Block mengenai bagaimana kapitalis dan aparat negara berinteraksi. Menurut Callinicos, nalar kapitalis dan aparat negara memiliki perbedaan. Kapitalis berusaha untuk mengakumulasi kekayaan karena hal itulah

yang membuatnya bisa terus menjadi kapitalis di tengah kompetisi yang ketat. Sementara itu, aparatus negara memperoleh kekuasaan dari kemampuannya untuk mengontrol populasi serta memperkuat diri dari ancaman negara lain. Dalam keadaan tertentu, dua kepentingan ini bisa saling memperkuat maupun berkontradiksi. Agar dapat beroperasi, kapitalisme memerlukan kekuatan negara—mulai dari menjamin berlangsungnya kepemilikan privat sampai melakukan akumulasi primitif. Negara juga dapat memperkuat dirinya dengan menggunakan kapital yang diperoleh melalui akumulasi. Meski demikian, negara bisa saja menghambat kepentingan kapital ketika berusaha menghambat arus kapital keluar dari negara atau ketika negara harus memenuhi tuntutan kelas pekerja yang menguat. Artinya, kepentingan kapital dan negara tidaklah identik. Keduanya memiliki nalar masing-masing karena keduanya berada dalam struktur berbeda—kapitalisme mensyaratkan akumulasi dan kompetisi sementara sistem negara-bangsa mengharuskan negara bertahan hidup (2009, hal. 84-85).

Argumen Harvey dan Callinicos di atas dapat merepresentasikan bagaimana teori imperialisme baru bekerja. Teori imperialisme baru berusaha memahami politik internasional dengan mula-mula melakukan pemisahan antara logika kapitalisme dan logika negara. Dengan melakukan pemisahan ini, maka menjadi mungkin bagi teori-teori ini untuk mengakomodasi peran moda produksi dan sistem negara-bangsa dalam politik internasional tanpa harus melakukan reduksi.

Meski demikian, teori imperialisme baru masih dihantui oleh resiko reifikasi terhadap sistem negara-bangsa. Pemisahan antara logika kapitalisme dan logika negara pada akhirnya menuntut teori-teori ini untuk menjelaskan darimana logika negara berasal. Dalam karya-karyanya, Harvey tidak pernah secara khusus mendiskusikan asal-usul logika teritorial. Harvey tidak pernah menjelaskan mengapa negara harus saling menundukkan satu sama lain dalam dunia internasional. Callinicos—yang menyadari bahwa teorinya berpotensi melakukan reifikasi terhadap sistem negara-bangsa—berusaha menjelaskan mengapa ada “*realist moment*” dalam dinamika politik internasional. Meski demikian, penjelasan Callinicos dalam perdebatan *Cambridge Review of International Relations* hanya berujung pada penjelasan Callinicos tentang bagaimana interaksi antara logika kapitalisme dan logika negara bisa muncul. Callinicos, tepat seperti yang dikritik oleh Davenport (2011, hal. 30), tidak mampu menjelaskan mengapa logika negara itu sendiri bisa hadir. Oleh karena itu, teori-teori imperialisme baru sebetulnya memiliki kecenderungan yang besar untuk melakukan reifikasi terhadap sistem negara-bangsa.

Sejumlah perdebatan dalam tubuh Marxisme masih berusaha untuk mengurai permasalahan ini. Teschke dan Lacher menjelaskan bahwa struktur dunia yang anarkis sudah ada sebelum kemunculan kapitalisme. Konsekuensinya, tak ada hubungan yang substansial antara sistem negara-bangsa dan kapitalisme. Hubungan di antara keduanya murni kontinjen. Meski demikian, Teschke dan Lacher menulis bahwa kapitalisme bisa menciptakan konsep kedaulatannya sendiri dan keluar dari sistem negara-bangsa. Bagi teori imperialisme baru, kesimpulan Teschke dan Lacher (2007) membuat argumen mengenai kontestasi di antara negara-bangsa menjadi tak relevan karena kontestasi tersebut tak lebih dari sekadar warisan masa lalu yang akan hilang seiring dengan berkembangnya kapitalisme. Di sisi lain, Wood (1995, hal. 19-48; 2003, hal. 1-8; hal. 143-168) dan Rosenberg (1994, hal. 1-8) berargumen bahwa konsep kedaulatan modern tumbuh sempurna tepat ketika kapitalisme berkembang. Pada saat itu, negara tak lagi mengatur secara langsung proses ekstraksi surplus. Meski demikian, negara bertugas menjamin proses itu dapat berlangsung. Karenanya, Wood berargumen bahwa sistem negara-bangsa kontemporer diperlukan oleh kapitalisme untuk membuat proses ekstraksi terjadi. Secara lebih spesifik, Wood juga mengatakan bahwa pluralitas negara-bangsa diperlukan ketika jangkauan kapitalisme semakin luas. Meskipun argumen Wood bisa membantu teori imperialisme baru untuk membuktikan bahwa hubungan antara negara dan kapitalisme tidak kontinjen, argumen Wood meletakkan negara sebagai fungsi dari kapital—sesuatu yang berusaha dihindari oleh teori imperialisme baru.

Teori imperialisme baru dengan demikian mengalami kesulitan dalam menjelaskan sumber kemunculan logika teritorial. Di satu sisi, pemisahan logika kapitalisme dari logika teritorial memungkinkan teori ini menghindari reduksi. Di sisi lain, pemisahan ini menuntut adanya penjelasan tentang mengapa logika teritorial muncul. Ketidakmampuan teori imperialisme baru dalam memberi penjelasan tentang akar logika teritorial tak pelak membuat gagasan ini beresiko melakukan reifikasi seperti yang dilakukan Waltz terhadap struktur internasional.

### ***SIMPULAN***

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori imperialisme baru, hingga derajat tertentu, berpotensi menjawab permasalahan yang muncul dalam perdebatan Realisme dan Marxisme. Hal ini dilakukan dengan cara memisahkan logika kapitalisme dan logika negara. Pemisahan ini memungkinkan teori imperialisme baru untuk meletakkan struktur moda produksi dan struktur politik internasional sebagai dua aspek yang sama-sama

penting dalam memahami politik internasional tanpa melakukan reduksi. Meski demikian, teori imperialisme baru masih kesulitan untuk keluar dari problem reifikasi atas struktur internasional. Ketidakmampuan teori imperialisme baru untuk menjelaskan sumber keberadaan logika teritorial membuat logika itu diperlakukan sebagai sesuatu yang ahistoris—tepat seperti yang dilakukan oleh Neorealisme.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Berki, R. N. (1971). On Marxian Thought and the Problem of International Relations. *World Politics*, 24(1), 80-105.
- Brewer, A. (1990). *Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey*. London: Routledge.
- Callinicos, A. (2007). Does Capitalism Need the State System? *Cambridge Review of International Affairs*, 20(4), 533-549.
- Callinicos, A. (2009). *Imperialism and Global Political Economy*. Cambridge: Polity Press.
- Davenport, A. (2011). Marxism in IR: Condemned to Realist Fate? *European Journal of International Relations*, 19(1), 27-48.
- Gills, B. K. (1987). Historical Materialism and International Relations Theory. *Milennium: Journal of International Studies*, 16(2), 265-270.
- Halliday, F. (1987). Vigilantism in International Relations. *Review of International Studies*, 13(3), 163-175.
- Halliday, F. (1994). *Rethinking International Relations*. London: MacMillan.
- Harvey, D. (2001). *Spaces of Capital*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Harvey, D. (2005). *New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2006). *The Limits to Capital*. London: Verso.
- Krasner, S. D. (1992). Realism, Imperialism, and Democracy: A Response to Gilbert. *Political Theory*, 20(1), 38-52.
- Kubalkova, V., & Cruckshank, A. (2015). *Marxism-Leninism and Theory of International Relations*. London: Routledge.
- Linklater, A. (1990). *Beyond Realism and Marxism*. New York: Palgrave MacMillan.

- Maclean, J. (1988). Marxism and international relations: a strange case of mutual neglect. *Millennium: Journal of International Studies*, 18(2), 295-319.
- Rosenberg, J. (1994). *Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations*. London: Verso.
- Teschke, B., & Lacher, H. (2007). The Changing Logics of Capitalist Competition. *Cambridge Review of International Affairs*, 20(4), 565-580.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Wood, E. (1995). *Democracy Against Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wood, E. (2003). *Empire of Capital*. London: Verso.